

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan analisis dan hasil hipotesis yang dilakukan secara penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu akan diberikan kontribusi yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini dan bagian saran sebagai lanjutan dari hasil penelitian ini lanjutannya.

A. Kesimpulan

Dalam berbagai literatur, pembahasan tentang implementasi pemerintahan digital (*e-government*), maka akan terkait dengan pemberian pelayanan publik, aspek-aspek yang mendukung, terbatasnya dukungan ataupun keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dari hasil pengujian dan pembahasan yang sudah dilakukan dari hasil pengujian secara empiris menunjukkan bahwa infrastruktur TIK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi pemerintahan digital (*e-government*). Artinya berhasilnya penerapan pemerintahan digital harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang mumpuni. Infrastruktur erat kaitannya dengan jalannya teknologi.

Digitalisasi sebagai output dari teknologi menuntut kebutuhan jaringan dan pendukung sistem agar bisa efektif digunakan oleh pengguna. Mencapai keberhasilan implementasi *e-government* di negara-negara berkembang harus diperhitungkan beberapa isu penting seperti infrastruktur TIK (Odat, 2012), infrastruktur TIK yang lemah merupakan tantangan berat dalam *e-government* (Osei-Kojo, 2017). Tantangan infrastruktur TIK yang lemah terutama berada di daerah yang memiliki nagari/desa dengan lokasi yang sulit dan jaringan internet yang sulit.

Keuangan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan pemerintah digital, namun keuangan dapat berpengaruh jika dimediasi oleh faktor lain. Keuangan dalam implementasi pemerintahan digital menjadi indikator reflektif dari faktor lain agar dapat mempengaruhi peningkatan pelaksanaan pemerintahan digital. Artinya hubungan keuangan daerah dengan implementasi pemerintahan digital dimediasi oleh faktor lain. Hasil ini berbeda dengan studi lain yang menunjukkan bahwa keuangan berpengaruh dalam adopsi pemerintahan digital (Alshehri & Drew, 2010; Nkohkwo & Islam, 2013a; Odat,

2012). Perlu suatu kebijakan dan komitmen yang kuat untuk menggerakkan keuangan agar berperan dalam keberhasilan *e-government*.

Sumber daya manusia dan budaya organisasi menunjukkan hasil positif dan pengaruh signifikan terhadap implementasi *e-government* (Asniati et al., 2018; Das, Singh, & Joseph, 2016b; Nkohkwo & Islam, 2013b; Wairiuko et al., 2018b). Sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan pemerintahan digital di pemerintah daerah Sumatera Barat. Daerah yang sudah menjalankan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan pencapaian pemerintahan digital “baik” dianggap cukup memiliki kapasitas sumber daya manusia yang baik dibidang IT, walaupun tidak dipungkiri kedepannya masih tetap dilakukan perekrutan untuk tenaga IT. Namun pencapaian kategori “baik” tersebut di Kabupaten/Kota masih dapat dibilang bisa dihitng dengan jari, artinya daerah yang benar-benar yang memadai SDM nya dalam keberhasilan *e-government* juga belum terpenuhi.

Budaya organisasi merupakan salah satu determinan yang berpengaruh dalam pencapaian *e-government*. Banyak yang tidak peduli hubungan budaya dalam organisasi terutama dalam memanfaatkan teknologi, namun saat sekarang ini budaya organisasi dianggap sebagai motivasi yang menjadi pendorong orang-orang yang sebelumnya tidak mau menggunakan teknologi dalam pekerjaannya menjadi mau menggunakan, yang akhirnya menjadi kebiasaan (*habbit*). Dengan demikian budaya organisasi dianggap salah satu keberhasilan implementasi *e-government* apabila semua orang dapat memahami dan mempraktekkan dalam pekerjaannya sehari-hari, bahkan mau mensharing dengan organisasi lain.

Tekanan eksternal sebagai bagian dari konteks *environment* dalam pengujian kelima juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif dalam implementasi pemerintahan digital, hasil ini sesuai dengan studi sebelumnya (Jeyaraj et al., 2006; Nurdin, Stockdale, Scheepers, et al., 2017). Berdasarkan penelitian tekanan lebih besar dalam pemanfaatan pemerintahan digital berasal dari kepala daerah, namun tekanan tersebut tidak dapat direalisasikan jika banyak faktor penghambatnya sehingga dianggap bisa ditunda terlebih dahulu. Namun tekanan eksternal yang berasal dari masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi seperti propinsi dan pusat tidak kurang dimiliki hal ini menjadikan daerah belum

memprioritaskan secara utama dalam mewujudkannya. Bagaimanapun tekanan dapat memacu peningkatan pelayanan dalam teknologi di daerah.

Faktor politik sebagai faktor lain yang diuji sebagai determinasi pemerintahan digital (*e-government*), dengan variabel yang diajukan yaitu kemauan politik (*political will*). Dari hasil penelitian diketahui bahwa *political will* menjadi salah satu determinan secara langsung terhadap implementasi pemerintahan digital (*e-government*). Secara keseluruhan hasil penelitian mendukung pendapat Brinkerhoff (2002) yang menjelaskan bahwa faktor politik merupakan bagian dari konteks lingkungan sesuai dengan kerangka TOE (*Technology-Organizing-Environment framework*). Hal ini membuktikan bahwa melalui komitmen yang kuat dari kepala daerah dapat menggerakkan tujuan yang ingin dicapai. *Political will* atau komitmen politik pemerintah sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan *e-government* menjadi sebagai suatu keputusan yang akhirnya diratifikasi (disahkan) dalam peraturan. Dengan demikian *e-Government* membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat agar berhasil. Kepemimpinan yang kuat dapat memastikan komitmen jangka panjang dari sumber daya dan keahlian serta kerjasama dari faksi-faksi yang berbeda. Pemerintah perlu memprioritaskan beberapa program di atas yang lain untuk memaksimalkan dana yang tersedia mengingat sumber daya yang sangat terbatas. Ini akan memerlukan tujuan yang jelas untuk program dan rute yang jelas untuk pencapaian tujuan tersebut.

Political will merupakan kekuatan bagi daerah dalam menjalankan suatu inovasi terutama dalam teknologi. Berbagai aspek yang terlibat serta semua hambatan yang ditimbulkan dari perencanaan dan pelaksanaan suatu inovasi akan membutuhkan kemauan yang kuat dari kepala daerah sebagai perencana dan pelaksana, serta dukungan DPRD yang akan mengawasi program yang dijalankan daerah. Apabila suatu negara atau daerah disebut sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya yang potensial, namun jika tidak memiliki kebijakan dan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, maka hal itu akan menjadi sia-sia saja. Intinya kebijakan dalam melaksanakan sesuatu termasuk memanfaatkan teknologi dalam pemerintahan tergantung dari *decision makernya*. Artinya *Political will* dalam *e-government* betul-betul direalisasikan dalam tindakan politik yang menyeluruh seperti melakukan politik anggaran, politik aturan, politik kebijakan.

Jika itu dilaksanakan maka tidak mungkin implementasi *e-government* di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat seperti daerah lain.

Pengaruh implementasi pemerintahan digital terhadap akuntabilitas daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas daerah. Artinya implementasi pemerintahan digital merupakan salah satu cara dalam pencapaian akuntabilitas. Dengan implementasi teknologi yang berbasis digital memudahkan pekerjaan daerah baik secara teknis maupun administrasi terutama pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pekerjaan berjalan efektif dan efisien sehingga akuntabilitas daerah dapat diwujudkan.

B. Implikasi Penelitian

Secara teoritis, metodologi dan kontribusi praktikal maka implikasi dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi Teori

Berkaitan dengan kontribusi teoretis, hasil penelitian ini menyediakan beberapa masukan literatur tentang inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan digital atau *e-government*. Kontribusi studi ini untuk memberikan model konseptual dari penerapan teknologi yang penting termasuk identifikasi munculnya hubungan baru antara *political will* dalam sistem *e-government* sebagai indikator baru untuk keberhasilan teknologi keberlanjutan dan usulan konstruksi alternatif dalam mengukur penggunaan sistem.

Sehubungan dengan kontribusi teoritis pertama, dari penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa implementasi pemerintahan digital (*e-government*) dapat berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas daerah, hasil ini berbeda dengan pendapat Pina et al (2010) dan Al-Shbail & Aman, (2018) yang menjelaskan bahwa *e-government* belum bisa sebagai pengukur yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, faktor determinasi penyebab disfungsi *e-government* dalam mewujudkan akuntabilitas dapat diusulkan dari konstruk TOE yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada

beberapa isu penting yaitu infrastruktur TI, keuangan, sumber daya manusia, budaya organisasi serta tekanan eksternal.

Namun hasil riset membuktikan hasil yang berbeda pada faktor keuangan, keuangan bukan menjadi faktor terkait secara langsung dalam menciptakan implementasi *e-government*, namun keuangan dapat berperan apabila ada faktor lain yang menggerakkan. Salah satu penyebab perbedaan hasil penelitian disebabkan sumber keuangan yang dimiliki oleh setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat masih terbatas, hal ini memungkinkan tidak tercovernya semua pendanaan untuk pelaksanaan *e-government* yang jelas membutuhkan anggaran lebih untuk mewujudkannya. Selain itu berbagai aspek prioritas kepentingan yang terjadi yang didalam pemerintahan daerah tidak termasuk tentang implementasi *e-government* menjadi salah satu yang patut menjadi perhatian bersama oleh eksekutif maupun legislatif di daerah.

Kontribusi kedua yang dapat diusulkan secara teoritis adalah faktor politik dapat dikolaborasikan dalam kerangka TOE (*Technology-Organizing-Environment framework*) sebagai salah satu penerimaan teknologi di Pemerintah Daerah, artinya faktor politik sebagai salah satu determinan secara langsung dalam mencapai keberhasilan pemerintahan digital (*e-government*). Topik yang membahas pemerintahan digital yang kaitannya dengan politik memiliki literatur yang terbatas, terutama *political will* (kemauan politik) sebagai suatu konsep kebijakan dalam proses politik. Selain *political will* dapat berperan secara langsung juga dapat berperan sebagai mediasi variabel sumber daya terhadap peningkatan implementasi pemerintahan digital khususnya menjadi full mediasi bagi sektor keuangan. Namun *political will* sebagai variabel kebaruan yang diamati dalam penelitian ini, dapat digolongkan kedalam sektor lingkungan (*environment*) karena *political will* tidak saja melibatkan komitmen pimpinan, namun juga melibatkan peran legislatif dan masyarakat untuk mewujudkannya.

Kontribusi teoritis ketiga dari penelitian ini melibatkan pengukuran implementasi sistem *e-government*. Beberapa peneliti telah mengkritik konstruksi penggunaan sistem yang digunakan di sebagian besar penelitian tentang sistem teknologi perlu dua tahap dalam melakukan penelitian yaitu

mendefinisikan penggunaan sistem dan menjelaskan asumsi yang mendasarinya kemudian tahap seleksi dengan menkonseptualisasikan struktur dan fungsi penggunaan sistem yang terdiri dari pengguna, sistem dan tugas (Burton-Jones & Straub Jr, 2006) Sehingga jarang yang berusaha terlebih dahulu memvalidasi relevansi konstruksi penggunaan sistem dengan konteks penelitian. Menyikapi kritik tersebut, penelitian ini dapat mengusulkan untuk memenuhi asumsi tersebut, dimana penelitian ini memberikan konsep awal dari pemahaman pengguna sistem untuk mengkonstruksi model penelitian ini dari faktor determinan disungsinya implementasi e-government. Pemahaman pengguna diukur dengan dimensi yang dibangun disekitar konstruksi yang menggunakan framework TOE. Implementasi e-government ditangkap dari antusiasme pengguna menggunakan sistem ini yang diukur dengan menggunakan persepsi pada skala likert. Dibandingkan pengukuran sekunder sebagai penggunaan sistem dianggap kurang relevan untuk digunakan dalam menghasilkan konstruktif awal.

2. Kontribusi Praktek / Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, bahwa daerah dapat mengambil kebijakan dalam pengembangan dan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan rencana beberapa daerah yang akan menerapkan *smartcity* namun faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam keberhasilan pemerintahan digital, dapat dievaluasi dan dilakukan peningkatan bagi faktor yang terkait kurang diterapkan atau dimiliki.

Selain itu kepala daerah beserta perangkatnya dapat menjalankan tujuan dan rencana pembangunan daerahnya dengan memiliki keinginan yang kuat (*political will*) dalam pemerintahan untuk menerapkan teknologi yang berbasis digitalisasi yang dituangkan dalam RJPMD dan dipertegas dengan menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan.

3. Kontribusi Metodologi

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penggunaan metodologi dalam penelitian. Banyak penelitian terdahulu lebih cenderung melakukan

penelitian dibidang teknologi terutama adopsi pemerintahan digital dengan metode penelitian kuantitatif dan sedikit dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemanfaatan metode penelitian dengan *mix methods* menjadi alternatif yang bisa direkomendasikan dalam studi-studi yang membahas teknologi sehingga hasilnya dapat dikonfirmasi secara langsung sesuai dengan implementasi secara nyata di lapangan. Selain dari pemanfaatan metode *mix method* masih dalam literatur yang terbatas, sehingga hasil riset ini salah satu referensi dalam pemanfaatan *mix method*, bisa dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih meyakinkan karena menggunakan 2 (dua) metode yang berbeda sebagai penelitian yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *exploratory research*, yang bertujuan untuk mendapatkan asumsi awal terhadap implementasi *e-government*. Meskipun bersifat asumsi awal, namun ada beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk studi berikutnya. Hasil penelitian hanya melingkupi pada daerah Provinsi Sumatera Barat, tetapi belum memperoleh hasil yang sama jika dilakukan pada daerah lain diluar Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, secara nasional belum tentu bisa digeneralisasikan, dan perlu diidentifikasi secara lebih luas pada subjek yang berbeda. Analisis penelitian hanya difokuskan pada pengukuran yang bersifat persepsi, sehingga kesimpulan yang dapat dijawab hanya pada konteks persepsi, untuk itu perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan pengukuran yang bersifat kuantitatif, menggunakan rasio atau jumlah pengunjung website Pemda.

Implementasi sistem yang digunakan dalam penelitian ini tecakup kepada penerimaan teknologi di lingkup organisasi, sehingga pemanfaatan hanya dilihat pada satu bagian yaitu pada penyedia sistem namun belum terlihat pemanfaatan pada sisi permintaan sistem sebagai pengguna layanan yaitu masyarakat. Untuk itu perlu pengembangan untuk penelitian selanjutnya dengan melihat perspektif masyarakat terhadap layanan *e-government* yang diterima dari pemerintah. Selain itu didasarkan metodologi walau menggunakan *mix methods*, namun peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan pengujian secara statistik yang kemudian

dikonfirmasi secara langsung kepada narasumber berdasarkan hasil kuantitatif yang diperoleh sehingga kurang menyentuh pada masalah utama yang terjadi di daerah, untuk itu penelitian berikutnya terlebih dahulu perlu mengidentifikasi secara langsung apa yang menjadi hambatan implementasi *e-government* kepada narasumber melalui wawancara, setelah itu mungkin bisa dilakukan pengujian dengan analisis faktor untuk menemukan faktor-faktor kunci yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi *e-government*.

